



PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIC INDONESIA

No. : 1669/E.8/p/10.2017

Hal. : Hasil Permohonan ISBN

Yth. Pimpinan Pustaka Magister Semarang

u.p. Bagian Penerbitan
Semarang

Dengan ini disampaikan hasil permohonan ISBN, sebagai berikut :

**Pengelolaan obyek wisata alam dengan model kolaborasi
berbasis ecological tourism/ Giyah Yuliari, Bambang Riyadi
ISBN 978-602-0952-56-7**

Agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 20 Oktober 2017
Kepala Direktorat Deposit Bahan Pustaka
Perpustakaan Nasional RI,

Dra. Lucya Dhamayanti, M.Hum
NIP. 19590228 199003 2 001



PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

Apabila buku sudah diterbitkan harap diserahkan setiap judul 2 eksemplar ke Perpustakaan Nasional RI dan 1 eksemplar ke Perpustakaan Daerah di ibukota propinsi dimana buku diterbitkan sesuai Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah-Simpan Karya Cetak Dan Karya Rekam (Pasal 2)

Alamat pengiriman buku:

Perpustakaan Nasional RI
Direktorat Deposit Bahan Pustaka
Subdirektorat Deposit
Gedung E Lt.7
Jl. Salemba Raya 28A Kotak Pos 3624
Jakarta 10002 – Indonesia

Terima kasih atas partisipasi anda dalam mewujudkan Koleksi Deposit Bahan Pustaka Indonesia

UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 1990 TENTANG SERAH-SIMPAN KARYA CETAK DAN KARYA REKAM

BAB II

KEWAJIBAN SERAH - SIMPAN KARYA CETAK DAN KARYA REKAM

Pasal 2

Setiap penerbit yang berada di wilayah negara Republik Indonesia, wajib menyerahkan 2 (dua) buah cetakan dari setiap judul karya cetak yang dihasilkan kepada Perpustakaan Nasional, dan sebuah kepada Perpustakaan Daerah di ibukota propinsi yang bersangkutan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah diterbitkan.

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	ii
Daftar Gambar.....	iii
Kata Pengantar	iv
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
1.1. Obyek Wisata Alam.....	1
1.2 Permasalahan	4
1.3 Tujuan Penelitian	4
1.4 Manfaat Hasil Penelitian.....	4
BAB II. LANDASAN TEORI.....	6
2.1 Pengelolaan Secara Kolaboratif.....	6
2.2 Identifikasi Stakeholders.....	9
BAB III. METODE PENELITIAN	13
3.1 Desain Penelitian	13
3.2 Lokasi Penelitian.....	13
3.3 Metode Pengumpulan Data.....	13
3.4 Penentuan Informan	14
3.5 Instrumen Penelitian	14
3.6 Analisa Data.....	14
3.7 Tahapan Penelitian.....	15
BAB IV. IMPLEMENTASI MODEL KOLABORASI	16
4.1 Model Kolaborasi.....	16
4.2 Penerapani Model Kolaborasi Dalam Pengelolaan Obyek Wisata Alam.....	20
BAB V Penutup	22
Daftar Pustaka	23

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah Pengunjung Obyek Wisata alam Curugsewu Kec. Patean Kab. Kendal Tahun 2010 s/d 2017.....	2
Tabel 1.2 Jumlah Pendapatan Obyek Wisata Alam Curugsewu Kec. Patean Kab. Kendal Tahun 2010 s/d 2017	3
Tabel 2.1 Peran Dan Fungsi Stakeholder Obyek Wisata Alam Curugsewu.....	9

Tabel 2.2 Bidang Kunci Keberhasilan Model Kolaborasi pengelolaan Obyek Wisata.....	11
---	----

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Model Kolaborasi Pengelolaan Obyek Wisata Alam Berbasis Ecological Tourism	17
--	----

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT. Model Kolaborasi sebagai hasil luaran penelitian yang berjudul “Pengelolaan Obyek Wisata Alam Dengan Model Kolaborasi Berbasis Ecological Tourism “ telah dapat diselesaikan. Model Kolaborasi ini merupakan output penelitian Hibah produk terapan yang dibiayai oleh Kemenritek Dikti selama 2 tahun (2016-2017).

Desain penelitian ini adalah penelitian kualitatif, data disajikan dalam bentuk deskriptif dan mengambil Role Model Obyek Wisata Alam Curugsewu yang terletak di Desa Curugsewu Kecamatan Patean Kabupaten Kendal. Terbentuknya model Kolaborasi ini diharapkan dapat dimanfaatkan untuk menjadi salah satu solusi pengelolaan dan pengembangan Obyek wisata alam, yang tersebar hampir diseluruh Indonesia, agar potensi kekayaan alam bangsa Indonesia dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakatnya, tanpa merusak lingkungan alam, yang merupakan karunia Allah SWT.

Akhir kata kami ucapkan terima kasih Kepada Yang Terhormat :

1. Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia
2. Rektor Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang
3. Dekan Fakultas Ekonomika Dan Bisnis (UNTAG) Semarang
4. Pemerintah Kabupaten Kendal
5. Kepala Devisi Regional Perum Perhutani Propinsi Jawa Tengah
6. Semua Stakeholders Obyek Wisata Alam Curugsewu Kec. Patean Kabupaten Kendal.

Semoga model Kolaborasi ini dapat bermanfaat, terutama untuk obyek wisata alam yang memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi destinasi wisata. Disamping itu model ini diharapkan dapat dijadikan referensi bagi peneliti selanjutnya.

Semarang, 25 September 2017
Tim Peneliti

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Obyek Wisata Alam

Indonesia memiliki obyek wisata alam yang tersebar di hampir semua daerah. Obyek wisata alam ini terbentuk karena letak geografis Indonesia yang berada di garis khatulistiwa. Hujan dan Sinar matahari tercurah setiap tahun, pada musim penghujan dan musim kemarau. Iklim panas dan penghujan yang dimiliki Indonesia membentuk flora dan fauna yang beraneka ragam serta memiliki keindahan dan keunikan tersendiri. Keindahan alam dari flora dan fauna menjadikan alam demikian indah untuk dinikmati, beraneka ragam keindahan alam (laut, hutan danau, gunung, goa, kepulauan) yang tercipta karena anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Bangsa Indonesia sangat bersyukur karena anugerah yang luar biasa.

Keindahan alam yang luar biasa tidak hanya dinikmati saja tetapi juga dapat menjadi obyek wisata alam. Sepuluh obyek wisata alam Indonesia yang sangat terkenal di seluruh dunia, meliputi Kepulauan Raja Ampat (Papua), Pulau Komodo (Kepulauan Nusa Tenggara), Gunung Rinjani (Pulau Lombok), Kepulauan Belitang, Gunung Bromo (Jawa Timur), Kawah Ijen (Jawa Timur), Taman Laut Bunaken (Sulawesi Utara), Danau Kelimutu (Flores), Pantai Dreamland (Bali), Danau Toba (Sumatera Utara). Obyek wisata alam tersebut sudah menjadi destinasi wisata karena mampu menarik para wisatawan untuk berkunjung. Kedatangan para wisatawan memberikan berbagai peluang usaha yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat disekitarnya dan devisa bagi negara.

Sejalan dengan pendapat Prof. Hunziker dan Kraft (1942) yang menyatakan, bahwa pada dasarnya pariwisata merupakan kegiatan seseorang berkunjung ke suatu tempat yang menarik, jangka waktu kunjungan tidak lama dan tidak untuk mendapatkan uang.. Dari pengertian tersebut jelas bahwa seseorang akan datang ke suatu tempat karena ketertarikan akan keunikan tempat atau obyek wisata alam tersebut. Mengapa banyak obyek wisata alam

di hampir setiap daerah di Indonesia tidak menjadi destinasi wisata. Kendala yang utama karena potensi obyek wisata alam Indonesia belum seluruhnya dikelola secara profesional. Sebagai contoh Obyek wisata Curugsewu merupakan obyek wisata alam yang memiliki potensi alam yang sangat beraneka ragam untuk dijadikan sebagai obyek wisata alam namun demikian belum menjadi destinasi wisata, bahkan wisatawan lokalpun enggan untuk berkunjung ke lokasi wisata alam tersebut. Berdasarkan data BPS Kendal dalam angka 2010-2017 diperoleh data jumlah pengunjung yang cenderung meningkat setiap tahun. Data menunjukkan bahwa pengunjung obyek wisata alam Curugsewu didominasi oleh wisatawan nusantara (Wisnus), berikut ini disajikan data pengunjung obyek wisata alam Curugsewu.

Tabel 1.1 Jumlah Pengunjung Obyek Wisata alam
Curugsewu Kec. Patean Kab. Kendal
Tahun 2010 s/d 2017

No	Tahun	Jumlah Pengunjung		Jumlah Seluruh Pengunjung
		Wisman	Wisnus	
1	2010	0	57,800	57,800
2	2011	0	71,309	71,309
3	2012	0	69,216	69,216
4	2013	0	78,346	78,346
5	2014	0	93,648	93,648
6	2015	0	92,555	92,555
7	2016	0	83,131	83,131

Sumber : Kendal Dalam Angka 2010-2017

Data tabel 1.1 menunjukkan bahwa jumlah pengunjung berfluktuasi cenderung meningkat. Rerata pengunjung setiap tahun 6.500 orang. Pengunjung Mancanegara selama tujuh tahun terakhir tidak ada. Tidak adanya pengunjung dari Mancanegara menunjukkan bahwa informasi dan promosi masih harus diefektifkan lagi. Aset negara yang berupa keindahan alam yang begitu eksotik dan memiliki keunikan tersendiri belum dipromosikan secara maksimal terutama di Mancanegara. Hal ini tentu saja sangat berpengaruh terhadap

pendapatan yang diterima, data tentang penerimaan Obyek Wisata Alam Curugsewu selama 7 tahun adalah sebagai berikut :

Tabel 1.2 Jumlah Pendapatan Obyek Wisata alam Curugsewu Kecamatan Patean Kabupaten Kendal				
No	Tahun	Jumlah Pendapatan (Rp.)		Jumlah seluruh Pendapatan (Rp.)
		Wisman	Wisnus	
1	2010	0	238,094,000	238,094,000
2	2011	0	249,261,000	249,261,000
3	2012	0	340,192,000	340,192,000
4	2013	0	387,564,000	387,564,000
5	2014	0	493,214,000	493,214,000
6	2015	0	500,201,000	500,201,000
7	2016	0	612,382,000	612,382,000
Sumber : Kendal Dalam Angka 2010-2017				

Data dari tabel 1.2 menunjukkan bahwa pendapatan dari obyek wisata Curugsewu meningkat, namun demikian pendapatan itu berasal dari wisatawan nusantara bukan dari mancanegara. Rerata pendapatan setiap tahun Rp. 402.986.852. Pendapatan ini dinilai tidak memungkinkan digunakan untuk melakukan investasi. Oleh karena itu dengan menggandeng Investor diharapkan dapat memecahkan permasalahan pendanaan.

Pengamatan lebih lanjut menunjukkan bahwa kendala yang utama dalam pengelolaan obyek wisata adalah tidak adanya kesepahaman, kesepakatan dan kebersamaan antar stakeholders dalam pengelolaan obyek wisata tersebut. Kesepahaman, kesepakatan dan kebersamaan sangat penting sekali dalam membangun obyek wisata secara berkelanjutan. Salah Wahab dan John J.Pigram dalam buku Perencanaan & Pembagunan Pariwisata (Yoeti,2016), menyarankan bahwa dalam pembangunan pariwisata secara berkesinambungan, yang harus diperhatikan adalah adanya :

1. peraturan dan perundangan yang berlaku baik di tingkat lokal, dan nasional
2. pelaksana perencanaan, pembangunan, pengelolaan dan pemberdayaan yang terukur

Pelaksanaan Perencanaan, pembangunan, pengelolaan dan pemberdayaan harus ada kesepahaman, kesepakatan dan kebersamaan antar stakeholders. Untuk itu dibutuhkan strategi pengelolaan yang dapat merangkum kesepahaman, kesepakatan dan kebersamaan antar stakeholders.

1.2 . Permasalahan

1. Bagaimana model kolaborasi pengelolaan obyek wisata alam yang dapat mewujudkan kesepahaman dan kesepakatan antar stakeholder ?
2. Bagaimana mengimplementasikan model kolaborasi pengelolaan obyek wisata alam agar dapat mewujudkan Curugsewu menjadi destinasi wisata?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk menyusun model kolaborasi pengelolaan obyek wisata alam yang dapat mewujudkan kesepahaman dan kesepakatan antar stakeholders
2. Untuk menyusun tahapan dalam implementasi model kolaborasi pengelolaan obyek wisata alam agar dapat mewujudkan Curugsewu menjadi destinasi wisata

1. 4 Manfaat Hasil Penelitian

1. Terbentuknya pengelolaan obyek wisata dengan model kolaborasi berbasis *ecological tourism*.

2. Memberikan informasi kepada stakeholders tahapan implementasi model kolaborasi pengelolaan obyek wisata alam agar dapat mewujudkan Curugsewu menjadi destinasi wisata
3. Sebagai landasan pembuatan naskah akademik untuk disampaikan kepada pemerintah daerah tentang model kolaborasi dalam pengelolaan obyek wisata alam.

BAB II **LANDASAN TEORI**

2.1 Pengelolaan Secara Kolaboratif

Menurut Ephraim Feed (2012) kolaborasi terjadi apabila ada suatu kerja bersama antara dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan bersama. Dalam pencapaian tujuan bersama, tentu saja harus ada kesepakatan dan kesepahaman antara orang atau institusi yang kerja bersama, tanpa adanya kesepakatan dan kesepahaman antara orang atau institusi yang kerja bersama sulit untuk mencapai tujuan bersama. Kolaborasi lebih dari sekedar interaksi, membutuhkan aktivitas yang terkoordinir yang diusahakan secara terus menerus untuk membangun dan mempertahankan konsepsi bersama tentang sebuah masalah sampai batas waktu tertentu, kolaborasi membutuhkan tujuan yg jelas dan bertujuan untuk menghasilkan sesuatu. Kolaborasi dapat didefinisikan sebagai proses yang berkembang, terdapat dua atau lebih lembaga secara aktif dan timbal balik terlibat dalam kegiatan bersama yang memiliki tujuan dan mencapai suatu tujuan. Kolaborasi membutuhkan partisipasi dalam kegiatan bersama, ditujukan untuk mencapai tujuan bersama (. Bedwell, Wendy L, Jessica L. Wildman, Deborah DiazGranados, Maritza Salazar, William S. Kramer, Eduardo Salas, 2012).

Jadi dengan kolaborasi yang dimulai dari interaksi sosial diharapkan dapat menghasilkan solusi berbagai masalah tanpa mengurangi kepentingan stakeholders. Pemecahan masalah ini merupakan cara untuk mencapai tujuan bersama. Pengelolaan kolaborasi adalah strategi kolaborasi yang dibutuhkan untuk mengelola sumber daya alam tanpa meninggalkan kepentingan stakeholders (Kildow, 1997; Singleton, 1998). Stakeholders yang merupakan pihak-pihak yang berkepentingan terhadap pengelolaan sumber daya alam tersebut akan bekerja sama dalam mencapai tujuan dengan syarat kepentingannya terakomodir.

Pada dasarnya kolaborasi adalah suatu bentuk proses sosial, dimana didalamnya terdapat prinsip-prinsip sebagai berikut :

- a. Saling menghormati artinya saling memahami dan menghormati peran dan kedudukan masing-masing dalam kegiatan bersama.
- b. Saling menghargai artinya menghargai pendapat orang lain dan bersedia untuk memeriksa beberapa alternatif pendapat dan perubahan kepercayaan.
- c. Saling kerjasama artinya ikut serta dan berpartisipasi sesuai peran dan kedudukan masing-masing.
- d. Saling memberi kemanfaatan artinya setiap individu dalam tim mengartikannya sebagai suatu hubungan yang memfasilitasi proses dinamis antara orang-orang yang ditandai oleh keinginan maju untuk mencapai tujuan dan kepuasansetiap anggota.
- e. Saling asah, asih dan asuh artinya dalam berkolaborasi setiap pihak dapat saling asah (belajar), asuh (perduli) dan asih (menyayangi). Dengan kata lain, dengan adanya perbedaan maka masing masing individu mempunyai peluang untuk saling belajar satu dengan yang lain, saling perduli dan saling menyayangi.

Kriteria dan indikator kolaborasi merupakan tolok ukur apakah kolaborasi tersebut berjalan dengan baik. Kriteria dan indikator tersebut terdiri dari :

- a. Komitmen untuk bekerja bersama
 - 1. Adanya peleburan nilai nilai yang dianut semua pihak untuk mencapai tujuan
 - 2. Kesiediaan untuk mencurahkan waktu dan sumberdaya untuk mewujudkan tercapinya program kolaborasi
- b. Adanya kerelaan utuk bermitra
 - 1. Kesadaran pentingnya program kolaborasi untuk mencapai tujuan bersama
 - 2. Kesadaran pentingnya posisi kelompoknya dalam program kolaborasi
 - 3. Kesadaran untuk mencurahkan waktu dan tenaga tanpa paksaan pihak lain
 - 4. Kesadaran mencurahkan waktu dan tenaga tanpa imbalan jasa
- c. Kesepakatan peran dan tanggung jawab

1. Kesadaran peran yang harus dimainkan dalam program kolaborasi
 2. Kesadaran dan kesediaan untuk bertanggungjawab atas peran yang dimainkan
- d. Kesepakatan hak dan kewajiban
1. Kesadaran kewajiban yang harus dimainkan dalam program kolaborasi
 2. Kesadaran atas hak hak nya dalam program kolaborasi
- e. Komitmen untuk saling menguatkan kapasitas
1. Kesediaan para pihak untuk menguatkan kapasitas pihak tertentu yang dipandang perlu ditingkatkan
 2. Kesediaan menerima program penguatan kapsitas yang disepakati bersama
- f. Kesetaraan distribusi biaya dan manfaat
1. Kesediaan untuk membiayai kewajiban sesuai yang telah disepakati
 2. Kesadaran atas manfaat yang dapat diterima pihak tertentu yang telah disepakati
- g. Saling bertanggung jawab
1. Kesediaan untuk memantau kinerja pihak lain
 2. Kesediaan untuk menegur/mengingatkan peran dan tanggung jawab pihak lain
 3. Kesediaan untuk menerima saran dan masukan pihak lain
 4. Kesediaan menyelesaikan keberatan pihak lain sesuai mekanisme yang telah disepakati
- h. Transparansi pengambilan keputusan
1. Ketersediaan mekanismepengambilan keputusan bersama
 2. Ketersediaan lembaga penyelesaian keberatan yang dipercaya para pihak
 3. Kesediaan menerima keputusan sesuai dengan mekanisme yang disepakati

2.2. Identifikasi Stakeholders

Konsep stakeholder atau pemangku kepentingan menyatakan bahwa stakeholder adalah komponen lingkungan organisasi, yang merupakan jaringan dengan organisasi lain dengan kepentingan yang berbeda (Waligo, Victoria M., Jackie Clarke, Rebecca Hawkins, 2013). Obyek wisata alam Curugsewu memiliki stakeholder, lebih dari satu. Masing masing stakeholder, memiliki kepentingan terhadap keberadaan Curugsewu. Berdasarkan Hasil penelitian tahun 2016, diketahui bahwa Stakeholder Curugsewu peran dan fungsinya adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1 Peran Dan Fungsi Stakeholder Obyek Wisata Alam Curug Sewu

No.	Stakeholder	Fungsi	Peran dalam kolaborasi
A. Pemerintah Daerah			
1.	Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan (BAPERLITBANG)	Sebagai perencana pembangunan, salah satunya adalah perencanaan pengembangan pariwisata.	Memberikan arah perencanaan dan pengembangan pariwisata.
2.	Dinas Kepemudaan, Olah raga dan Pariwisata (DISPORAPAR)	Sebagai perencana, pembangunan, pengelola dan pemberdayaan kepemudaan, olahraga dan pariwisata.	Koordinator dan pelaksana pembangunan, pengelola, dan pemberdayaan obyek wisata alam di Curugsewu
3.	Perum Perhutani (Kesatuan Pemangku Hutan/KPH Kendal)	Sebagai perencana, pembangunan, pengelola dan pemberdayaan hutan secara efisien, lestari dan terpadu.	Koordinator perencanaan, pembangunan, pengelolaan, pemberdayaan dan pelestarian hutan di obyek wisata Curugsewu.
4	Badan Keuangan Daerah (BAKEUDA)	Pengelolaan keuangan daerah	Koordinasi pengelolaan keuangan dengan dinas terkait. Dalam pengelolaan obyek wisata alam Curugsewu, koordinasi yang dilakukan, antara lain penentuan harga tiket masuk. Besarnya sharing dengan lembaga terkait lainnya
5	Bidang Perencanaan Fisik dan Sarana Pemerintah Daerah	Sebagai perencana, pembangunan, pengelolaan dan pemberdayaan bidang	Penyediaan bidang dan sarana yang dibutuhkan oleh wisatawan obyek wisata

No.	Stakeholder	Fungsi	Peran dalam kolaborasi
		fisik dan sarana	Curugsewu
6	Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah (Disperinkop UKM)	Pemberdayaan dan sosialisasi tentang industri, koperasi dan UKM	Melakukan pelatihan, penciptaan produk inovatif, pengembangan ekonomi kreatif masyarakat di sekitar obyek wisata Curugsewu
7	Dinas Perdagangan (DISDAG)	Menyelenggarakan dan pelayanan bidang perdagangan dan pasar.	Melaksanakan promosi, pengembangan pasar bagi produk ekonomi kreatif dari daerah wisata untuk ditawarkan sebagai komoditi ekspor
B. Lembaga Sosial Masyarakat			
1	Lembaga Masyarakat desa Hutan	Organisasi resmi mitra perhutani dalam mengelola hutan	Pengawasan, pelestarian dan pengembangan ekonomi kreatif di obyek wisata alam Curugsewu
C. Lembaga Pendidikan			
1.	Pendidikan Tinggi	Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi	Melaksanakan pendidikan kewirausahaan, penelitian serta kajian ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat di obyek wisata Curugsewu
D. Swasta			
1.	Investor	Melakukan investasi	Menggali potensi yang memungkinkan untuk melakukan pengembangan, pengelolaan dan pemberdayaan di obyek wisata yang dapat melibatkan masyarakat disekitar obyek wisata
E. Petugas Keamanan			
1	Kepolisian setempat	Keamanan wilayah obyek wisata	Melakukan pengelolaan pengamanan disekitar obyek wisata
2	Polisi Hutan	Keamanan wilayah hutan	Melakukan pengelolaan pengamanan dan pengawasan hutan yang dijadikan sebagai obyek wisata alam.
F. Masyarakat sekitar Hutan			
1.	Masyarakat desa	Berpartisipasi dalam melindungi dan menjaga kelestarian hutan.	Menjaga kelestarian hutan dan Obyek wisata alam di Curugsewu.

Sumber : Hasil Penelitian 2016

Tabel 2.1 menunjukkan stakeholders yang ada di Curug Sewu fungsi dan perannya. Masing masing stakeholder memiliki kepentingan yang berbeda, melalui model kolaborasi diharapkan masing-masing stakeholder, dapat memiliki kesepahaman dan kesepakatan untuk mengembangkan obyek wisata Curugsewu. Adapun 4 bidang yang menjadi kunci keberhasilan pengembangan Obyek Wisata Curugsewu adalah bidang perencanaan, pembangunan, pengelolaan dan pemberdayaan. Dalam tabel 1.4 berikut ini akan diuraikan kegiatan masing masing bidang sebagai berikut :

Tabel 2.2 Bidang Kunci Keberhasilan Model Kolaborasi pengelolaan Obyek Wisata Alam

Bidang	Uraian Kegiatan
Perencanaan	Kegiatan perencanaan meliputi perancangan, penelitian dan pengembangan pariwisata. Semua kegiatan pariwisata harus mengacu pada perencanaan yang telah ditentukan. Perencanaan bersifat <i>Bottom Up</i> . Penentuan perencanaan diawali dari masukan Stakeholders, yang digodog oleh Baperlitbang agar sesuai dengan visi dan misi serta tujuan pemerintah daerah.
Pembangunan	Pembangunan akan melibatkan bidang fisik dan sarana, terutama aksesibilitas untuk mencapai obyek wisata alam, transportasi dan akomodasi untuk wisatawan. Pelaksana pengembangan potensi wisata alam dilakukan antara lain oleh Investor yang berkoodinasi dengan Dinas Kepemudaan, olahraga dan Pariwisata, Perum Perhutani agar kelestarian lingkungan tetap terjaga. Peran lembaga Pendidikan Tinggi dalam pembagunan obyek wisata alam, memberikan masukan yang bersifat mendidik agar obyek wisata alam juga menjadi <i>eco edu</i> wisata bagi wisatawan.
Pengelolaan	BAKEUDA merupakan pengelola keuangan dan asset daerah, berupaya agar aset dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya, serta memperoleh pendapatan asli dari daerah tersebut. Oleh karena itu dalam mengelola wisata alam, koordinasi dengan Perum Perhutani, Disporapar, Investor, masyarakat di sekitar hutan, Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH), Lembaga Pendidikan Tinggi. Perum Perhutani sangat penting agar obyek wisata alam dapat berkembang tanpa mengurangi kepentingan Perum Perhutani yaitu kelestarian lingkungan, diharapkan pengelolaan obyek wisata alam akan meningkatkan pendapatan asli daerah. Wisatawan tertarik berkunjung karena ada pelayanan yang baik. Penyelenggaraan pelayanan yang baik dapat dilakukan oleh Investor agar wisatawan tertarik berkunjung ke obyek wisata alam. Jaminan

Bidang	Uraian Kegiatan
	<p>keamanan merupakan faktor penting agar wisatawan merasa nyaman. Keamanan dalam hal ini keamanan dari gangguan kriminal dan keamanan sarana yang digunakan wisatawan. Peran Lembaga Pendidikan Tinggi sangat penting dalam mengedukasi masyarakat agar ikut melestarikan lingkungan, disamping itu koordinasi dengan Lembaga Masyarakat Desa Hutan akan menimbulkan rasa ikut handarbeni yang selanjutnya akan ikut melakukan pemeliharaan baik itu dalam bidang pelestarian lingkungan maupun mendorong obyek wisata agar menjadi destinasi wisata.</p>
Pemberdayaan	<p>Dalam pemberdayaan masyarakat disekitar hutan yang harus berperan adalah Disperinkop UKM, terutama dalam memunculkan ekonomi kreatif, Disdag dalam memasarkan dan promosi baik hasil dari ekonomi kreatif maupun obyek wisata alam. Investor diharapkan dapat ikut mengembangkan ekonomi kreatif, Lembaga Masyarakat Desa Hutan sebagai sasaran penghasil produk ekonomi kreatif harus diberikan pelatihan, melalui program pengabdian kepada masyarakat yang dimiliki lembaga pendidikan tinggi, LMDH atau masyarakat desa dapat bekerja sama memberikan pelatihan agar apa yang dilakukan oleh masyarakat Desa Hutan standard dan tidak terkena pelanggaran hak cipta.</p>

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Penelitian di desain sebagai penelitian kualitatif, data yang disajikan dalam bentuk deskriptif, dengan analisis yang mendalam dan fleksibel karena dapat berubah disesuaikan dengan keadaan di lapangan dan tujuan penelitian. Walaupun demikian, selalu ada pedoman untuk diikuti, tapi bukan aturan yang mati (Cassel & Symon, 1994; Strauss, 1987; Taylor & Bogdan, 1984). Jalannya penelitian dapat berubah sesuai kebutuhan, situasi lapangan serta hipotesa-hipotesa baru yang muncul selama berlangsungnya penelitian tersebut. Pengambilan sampel secara *purposeful sampling*, sampel dipilih tergantung dengan tujuan penelitian tanpa memperhatikan kemampuan generalisasinya.

3.2 Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan Di desa Curugsewu Kecamatan Patean dan Di Desa Sendang Sikucing Kabupaten Kendal. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan obyek wisata berada di areal hutan, memiliki kesamaan dengan obyek wisata alam didaerah lain di Indonesai, dengan kebijakan pengelolaan yang berbeda antar instansi, sama dengan permasalahan yang akan di carikan solusinya dan berkaitan dengan tujuan penelitian yang diajukan, seperti yang telah di paparkan dalam latar belakang masalah.

3.3 Metode Pengumpulan Data

Data yang dibutuhkan adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang langsung diperoleh dari informan, orang yang mengetahui secara mendalam tentang permasalahan yang akan dipecahkan, metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi yaitu cara pengumpulan data dengan pengamatan langsung ke obyek penelitian,

wawancara terbuka yang terstruktur maupun yang tidak terstruktur. Data sekunder adalah data yang berasal dari kajian beberapa dokumen, literature dan catatan-catatan terkait, dokumentasi berupa foto rekaman video tentang obyek penelitian.

3.4 Penentuan Informan

Penentuan informan dilakukan secara *purposive*, salah satunya memilih informan yang berpengalaman dan memiliki pengetahuan tentang obyek wisata tersebut yang berasal dari petugas Taman Curugsewu dan Air Terjun Curugsewu, yang sudah bekerja lebih dari 10 tahun, dan perangkat Kecamatan Patean.

3.5 Instrumen Penelitian

Dalam penelitian ini instrumen atau alat penelitian adalah peneliti itu sendiri sehingga peneliti harus “divalidasi”. Validasi terhadap peneliti, meliputi; pemahaman metode penelitian kualitatif, penguasaan wawasan terhadap bidang yang diteliti, kesiapan peneliti untuk memasuki objek penelitian -baik secara akademik maupun logiknya- (Sugiono,2009:305).

3.6 Analisa Data

Analisa Data dilakukan secara deskriptif kualitatif dan interpretative. Selanjutnya proses data dengan tahapan, mereduksi data, cara memilih dan konversi data yang diperoleh. Penyajian data dengan cara merangkai data yang telah dipilah menjadi satu kesatuan utuh. Menyimpulkan dengan cara melakukan tinjauan ulang di lapangan untuk menguji kebenarannya. Hasilnya diinterpretasikan dan disajikan dalam bentuk naratif.

3.7 Tahapan Penelitian

Tahap persiapan dilakukan berdasarkan parameter pengumpulan data yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman (1984), yaitu:

1. *The setting*, peneliti perlu mengetahui kondisi lapangan penelitian yang sebenarnya untuk membantu dalam merencanakan pengambilan data, dengan mendatangi Desa Curugsewu dan bertemu dengan perangkat desa atau kecamatan, untuk mengumpulkan data pendahuluan
2. *The actors*, berdasarkan data yang diperoleh, langkah berikutnya menentukan calon partisipan sesuai dengan karakteristik penelitian.
3. *The events*, menyusun protokol wawancara, meliputi: (a) pendahuluan; (b) pernyataan pembuka; (c) pertanyaan kunci; dan (d) probing.
4. *The process*, berdasarkan persiapan pada bagian pertama sampai ketiga, maka disusunlah strategi pengumpulan data secara keseluruhan. Strategi ini mencakup seluruh perencanaan pengambilan data mulai dari kondisi, strategi pendekatan dan bagaimana pengambilan data dilakukan.

BAB IV

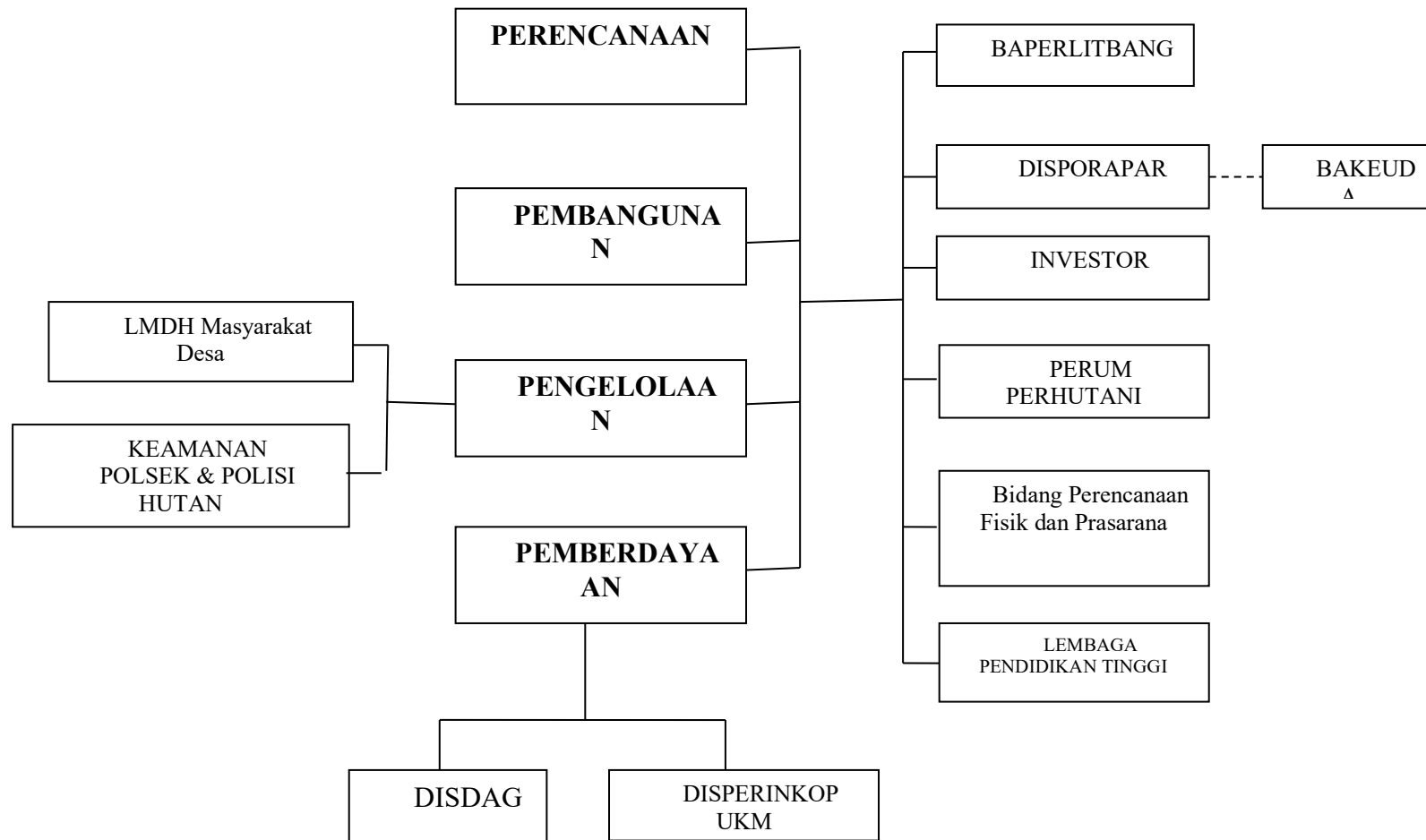
IMPLEMENTASI MODEL KOLABORASI

4.1 Model Kolaborasi

Setelah memperoleh data tentang stakeholders, dapat dibuat sebuah model pengelolaan obyek wisata. Model merupakan gambaran yang menjelaskan suatu sistem, atau konsep, yang seringkali berupa penyederhanaan dari pemecahan suatu permasalahan, bentuknya berupa rancangan tatakelola, prototipe, maket dapat juga berupa rumusan matematis (Wikipedia)

Model Kolaborasi dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa untuk mengembangkan obyek wisata berbasis *ecological tourism* terdapat 4 bidang pokok kegiatan yang menentukan keberhasilannya yaitu : Perencanaan, Pembangunan, Pengelolaan dan Pemberdayaan. Dalam model digambarkan Stakeholders yang membentuk kolaborasi untuk melaksanakan ke 4 bidang tersebut sesuai dengan kompetensinya diharapkan dapat berkolaborasi untuk mencapai tujuan bersama. Dalam berkolaborasi masing masing stakeholder akan berperan sesuai dengan bidangnya, semua pekerjaan akan dilakukan secara professional. Berikut ini model kolaborasi pengelolaan obyek wisata Curugsewu :

MODEL KOLABORASI PENGELOLAAN OBYEK WISATA ALAM BERBASIS *ECOLOGICAL TOURISM*



Gambar 4.1 : Model Kolaborasi Pengelolaan Obyek Wisata Alam (2017)

Gambar 4.1 model kolaborasi pengelolaan obyek wisata alam diatas, disamping didasarkan pada teori manajemen strategik dan kepariwisataan, journal nasional dan internasional, juga masukan dari peserta Focus Group Discussion (FGD), yang terdiri dari semua stakeholders obyek wisata alam Curugsewu, yang menjadi role model dalam pengelolaan obyek wisata alam dengan judul model kolaborasi pengelolaan obyek wisata alam berbasis *ecological tourism*.

Berdasarkan model tersebut akan lebih mudah dipahami mengelola obyek wisata alam, yang memiliki lebih dari satu stakeholder untuk berkolaborasi mencapai tujuan yang sama yaitu menjadikan obyek wisata alam tersebut sebagai destinasi wisata. Manfaat yang lain, berkolaborasi memiliki fleksibilitas merangkul semua anggota stakeholders untuk bekerja sama mencapai tujuan sehingga diperoleh peningkatan keuntungan karena dengan berkolaborasi bisa menjadi efisien., pengambilan keputusan melalui berbagai wawasan yang diberikan oleh stakeholders menjadi terpadu, adanya inovasi yang berasal dari ide ide stakeholders yang dapat di implementasikan untuk pengembangan Curug Sewu (Hansen dan Nohria, 2004).

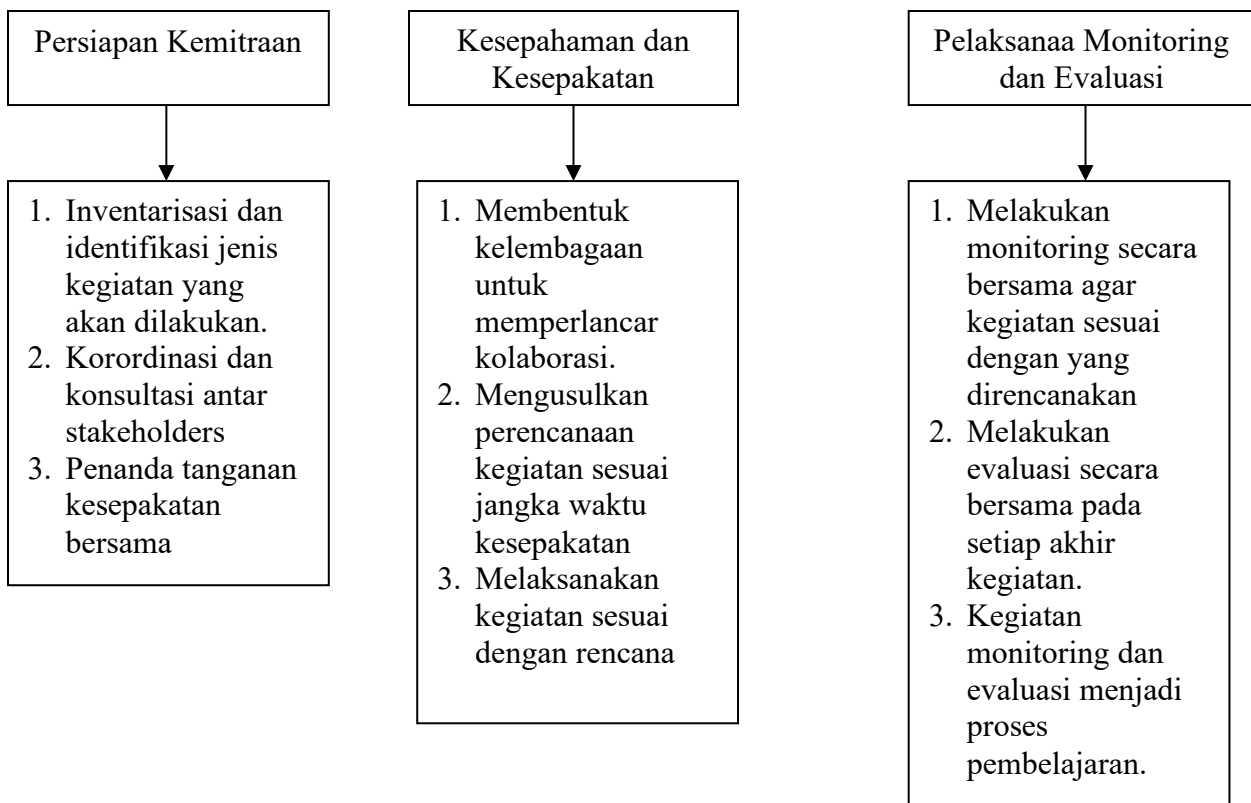
Penelitian yang dilakukan oleh Harshada Patel, Michael Pettitt, John R. Wilson (2012) menyatakan bahwa faktor yang membentuk kerangka Model kolaborasi adalah konteks (*context*), faktor faktor yang terkait dengan konteks di tempat berlangsungnya kolaborasi, yang meliputi budaya, Lingkungan, iklim bisnis dan struktur organisasi, dukungan (*support*), factor factor yang terkait dengan dukungan yang diberikan untuk kerja kolaboratif, yang meliputi *tools, networking, resources, training, team bulding, knowledge management, error management*, Tugas (*Task*) adalah faktor faktor yang terkait dengan tugas kolaboratif di tempat kerja yang meliputi *type* tugas kolaboratif, *structure* tugas, *demand* bahwa dalam tugas kolaboratif ada pekerjaan yang meminta usaha yang lebih besar untuk menyelesaikannya. Proses interaksi (*interaction Processes*), faktor faktor yang terkait

dengan proses interaksi kolaborasi di tempat kerja meliputi *learning, Coordination, Communication, Decision making*, Tim (*Teams*) faktor faktor yang terkait dengan tim di tempat kerja, meliputi *Roles, Relationships, Shared awareness/knowledge, Common ground, Group processes, Composition*, Individu (*Individuals*), Faktor-faktor yang berhubungan dengan individu di tempat kerja, meliputi *Skills, Psychological factors, Wellbeing*, Faktor yang menonjol (*Overarching factors*), faktor faktor yang terkait, *Trust, Conflict, Experience, Goals, Incentives, Constraints Management, Performance, Time*.

Model kolaborasi pada obyek wisata alam Curugsewu sudah mencakup semua yang diungkapkan oleh Harshada Patel, Michael Pettitt, John R. Wilson (2012). Hal ini dapat dicermati pada fungsi dan peran masing masing stakeholders yang menunjukkan adanya faktor faktor yang membentuk kolaborasi untuk mencapai tujuan bersama. Penggunaan model kolaborasi sebagai strategi pengelolaan obyek wisata merupakan salah satu cara untuk mengurai keterlibatan stakeholders, agar dapat berperan dalam mencapai tujuan bersama. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Wong, Emma P.Y, Nina Mistilis, Larry Dwyer (2011), tentang mekanisme kolaborasi pariwisata ASEAN, menampilkan model kolaborasi yang menekankan kolaborasi pada faktor lingkungan, yang meliputi 8 komponen yaitu 1) *world economy and politics*, 2) *regional economy and politics*, 3) *actors and their interrelationships*, 4) *preconditions of collaboration*, 5) *arena of collaboration*, 6) *the collaborative process*, 7) *factors that facilitate the collaboration*, and 8) *feedback mechanisms*. Model ini membantu memberikan pemahaman tentang fenomena pariwisata Asean yang sangat dipengaruhi oleh perubahan lingkungan internal dan eksternal negara negara yang tergabung dalam ASEAN. Jadi strategik kolaborasi merupakan salah satu strategik yang dapat digunakan untuk solusi permasalahan obyek wisata alam yang memiliki banyak stakeholders.

4.2 Penerapan Model Kolaborasi Dalam Pengelolaan Obyek Wisata Alam

Tindak lanjut dari model kolaborasi yang digunakan sebagai solusi untuk pemecahan masalah pengembangan obyek wisata alam, meliputi 3 hal pokok yaitu : 1. Persiapan kemitraan, 2. Kesepahaman dan kesepakatan. 3. Pelaksanaan dan monitoring. Masing masing point, memiliki kegiatan yang berbeda. Kerangka pemikiran yang mencakup kegiatan yang masuk dalam 3 hal pokok tersebut adalah sebagai berikut :



Gambar 4.2 : Kerangka pemikiran implementasi model kolaborasi

Gambar diatas menunjukkan penerapan model kolaborasi agar dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan bersama. Persiapan kemitraan merupakan kegiatan mengidentifikasi stakeholder yang akan diajak berkolaborasi, sesuai dengan kebutuhannya. Masing masing stakeholder menunjukkan kegiatan kegiatan yang akan dikerjakan. Hasil koordimasi dan konsultasi dijadikan sebagai materi pembuatan *Memorandum Of Understanding (MOU)*, yaitu kesepahaman dan kesepakatan hal-hal yang akan dikerjakan, jadi dalam MOU memuat banyak kegiatan yang akan dikerjakan namun belum jelas fokus

kegiatan yang akan dikerjakan. MOU bukan dasar untuk melakukan kegiatan. Jadi kalau berhenti sampai MOU, tidak ada kegiatan yang dapat dilakukan. dalam MOU memuat kegiatan kegiatan yang akan dilakukan tetapi belum jelas fokus kegiatan yang akan dilakukan..

Kesepahaman dan kesepakatan harus ditindak lanjuti dengan membuat Surat Perjanjian Kerja (SPK), dalam SPK akan disebutkan jenis kegiatan secara spesifik yang akan dikerjakan dengan stakeholder tertentu. Contoh Kabupaten Kendal daerah lokasi Obyek Wisata Alam Curugsewu., sudah melakukan *MOU* dengan Perum Perhutani, berarti sudah ada kesepahaman dan kesepakatan antara Kabupaten Kendal dengan Perum Perhutani. Misalnya Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) akan melakukan kegiatan yang berada di Curugsewu yang masuk wilayah Perum Perhutani, maka harus membuat Surat Perjanjian Kerjasama (SPK), tentang kegiatan yang akan dilakukan. Berdasarkan peraturan Perum Perhutani jangka waktu perjanjian 2 tahun dan dapat diperpanjang kembali.

Monitoring dan Evaluasi dilakukan setelah kegiatan dilakukan dalam jangka waktu tertentu. Monitoring dan evaluasi harus sesuai dengan SPK yang telah di setujui bersama. .Dalam membuat SPK jangka waktu sudah ditentukan, sebagai contoh SPK dengan Perum Perhutani hanya berlaku selama 2 tahun walaupun dapat diperpanjang kembali. Apabila hasil monitoring dan evaluasi ternyata tidak sesuai dengan ketentuan yang ada di SPK maka ini merupakan suatu proses pembelajaran, untuk saling mengkoreksi dan meninjau kembali ketidak sesuaian dengan ketentuan yang ada di SPK. Sesuai prinsip kolaborasi saling melakukan asah (belajar), asih (peduli) dan asuh (menyayangi) terhadap stakeholders dalam satu ikatan manajemen kolaborasi. Dalam tabel 4.1 berikut ini diuraikan kolaborasi yang mungkin dilakukan antar stakeholders, sebagai berikut :

Tabel 4.1 BENTUK KOLABORASI ANTAR STAKEHOLDERS

No.	Stakeholder	Mitra Kolaborasi	Legalitas	Kegiatan	Monitoring Dan Evaluasi (MONEV)
1	Pemda Kabupaten Kendal	Perum Perhutani	<i>Memorandum Of Understanding (MOU)</i> , adalah nota legal yang menjelaskn kesepahaman kegiatan yang akan digarap antara pihak pihak yang terlibat dalam MOU	Adanya kesepahaman dalam melakukan berbagai kegiatan yang sifatnya masih umum belum fokus pada suatu kegiatan yang akan dikerjakan	Peninjauan pelaksanaan MOU
2	LMDH & Masyarakat Desa	Perum Perhutani	Surat Perjanjian Kerjasama (SPK), Adalah perjanjian kerjasama tentang suatu kegiatan yang diuraikan secara detail bentuk kegiatan tersebut, yang melibatkan 2 pihak atau lebih, dalam jangka waktu tertentu.	Pengelolaan obyek wisata di areal hutan, membuat kampung wisata disekitar hutan, perjanjian bagi hasil retribusi tiket masuk obyek wisata alam.	Peninjauan kesesuaian antara rencana dan pelaksanaan
3	LMDH & Masyarakat Desa	Dinas Kepemudaan, Olah raga dan Pariwisata (Disporapar)	Surat Perjanjian Kerjasama (SPK)	Penyelenggaraan atraksi seni budaya setempat maupun seni budaya dari luar, bagi hasil tiket masuk obyek wisata, penyelenggaraan wahana untuk olah raga,	Peninjauan kesesuaian antara rencana dan pelaksanaan

No.	Stakeholder	Mitra Kolaborasi	Legalitas	Kegiatan	Monitoring Dan Evaluasi (MONEV)
4	Investor	Pemda Kab. Kendal	MOU dan Surat Perjanjian Kerjasama (SPK)	Penanaman modal untuk suatu kegiatan dalam jangka waktu tertentu	Peninjauan kesesuaian antara rencana dan pelaksanaan
5	Dinas Kepemudaan, Olah raga dan Pariwisata (Disporapar)	Perum Perhutani	Surat Perjanjian Kerjasama (SPK)	Pembenahan sarana untuk wisatawan (perlengkapan keamanan, toilet, food court, pemandu wisata, transportasi, penginapan, sistem pembayaran tiket masuk) Program gelar budaya, promosi dan Pusat Informasi wisata	Peninjauan kesesuaian antara rencana dan pelaksanaan
6	Lembaga Pendidikan Tinggi	Pemda Kabupaten Kendal, LMDH & Masysrakat Desa, Perum Perhutani	MOU dan Surat Perjanjian Kerjasama (SPK)	Pengabdian Kepada masyarakat, Kuliah Kerja Nyata (KKN), Kuliah Kerja Lapangan (KKL)	Peninjauan kesesuaian antara rencana dan pelaksanaan

Tabel 4.1 menunjukkan kolaborasi yang memungkinkan dilakukan antar stakeholders, dalam gambar juga nampak ada garis putus putus yang menghubungkan antara DISPORAPAR dengan BAKEUDA maksudnya adalah badan keuangan daerah bersifat koordinatif dengan DISPORAPAR tentang keuangan daerah yang dikelolanya.

Dalam berkolaborasi Stakeholder dapat melakukan dengan beberapa stakeholders yang. Dalam tabel diatas ditunjukkan bahwa Pem. Kab. Kendal sudah mengadakan MOU dengan Perum Perhutani, berarti semua institusi yang berada dibawah Pemerintah Kabupaten Kendal tidak perlu melakukan MOU, tetapi langsung membuat perjanjian kerjasama dengan instansi yang akan dijadikan mitra kolaborasi. Misal dalam tabel 4.1 Lembaga Pendidikan Tinggi yang bentuknya Universitas karena tidak berada dibawah Pemerintahan Kabupaten Kendal, apabila akan melakukan kerjasama dengan LMDH harus melakukan MOU dulu dengan Kabupaten Kendal berdasarkan MOU tersebut maka setiap fakultas yang akan melakukan kerjasama dengan instansi dibawah Pemerintah Kabupaten Kendal, cukup membuat Perjanjian kerjasama.

Demikian juga dengan Perum Perhutani karena tidak berada dibawah Pemerintah Kabupaten Kendal maka lembaga pendidikan tinggi dalam hal ini Universitas melakukan MOU dengan Perum Perhutani, kemudian setiap fakultas yang akan melakukan pengabdian kepada masyarakat langsung membuat Perjanjian kerjasama dengan Perum Perhutani, tentang kegiatan yang akan dilakukan.

Secara sederhana isi perjanjian kerjasama harus jelas dan rinci. Misalnya perjanjian kerjasama yang mengatur bagi hasil tiket masuk obyek wisata, harus jelas siapa stakeholder yang mendapat bagi hasil dan berapa besarnya, oleh karena itu sebelum menanda tangani surat perjanjian kerjasama, setiap stakeholder harus membuat konsep berapa bagi hasil yang diminta dalam kerjasama yang dilandasi prinsip prinsip kolaborasi.

Pokok pokok yang harus di negosiasikan dan didiskusikan serta ditulis dalam konsep perjanjian kerjasama, antara lain adalah siapa yang menanda tangani perjanjian kerjasama, harus dijelaskan, maksud kerjasama misalnya ada kegiatan yang saling menguntungkan dalam mengembangkan obyek wisata alam bagi pihak pihak yang bekerjasama. Tujuannya pengelolaan bersama obyek wisata alam, serta melakukan bagi hasil dari retribusi atau tiket masuk obyek wisata alam.

Obyek kerjasama adalah pemanfaatan asset daerah dan bagi hasil retribusi tiket masuk di obyek wisata alam. Lokasi obyek wisata alam juga harus jelas misal obyek wisata Curugsewu Desa Curugsewu Kecamatan Patean Kabupaten Kendal. Bentuk Kerjasamanya adalah kerjasama bagi hasil penerimaan dan pemanfaatan aset dan retribusi tiket masuk areal obyek wisata alam.

Ruang lingkup perjanjian meliputi pengelolaan dan pemeliharaan obyek wisata alam Curugsewu dan bagi hasil pemanfaatan asset dan retribusi tiket masuk areal obyek wisata alam.

Sistem pemungutan retribusi tiket masuk harus ada kesepakatan antar stakeholders menggunakan aplikasi computer, sistem *barrier gate* atau secara manual. Kemudian cara menghitung bagi hasil, menurut yang berlaku secara umum pendapatan yang diterima dikurangi semua biaya yang dikeluarkan kemudian baru dibagikan kepada pihak pihak yang terlibat dalam perjanjian kerjasama ini. Besaran bagi hasil ditentukan berdasarkan prosentase (%) kesepakatan antar stakeholders (misal : pihak kesatu :sebesar 60 % (enampuluh per seratus) Pihak kedua sebesar 25% (duapuluh lima per seratus), pihak ke tiga 15% (lima belas persen per seratus). Tata cara pembayaran misalnya bagi hasil dibayarkan pada setiap semester melalui transfer bank.

Dalam surat perjanjian kerjasama harus dicantumkan hak dan kewajiban masing masing stakeholders, juga menyangkut larangan yang harus disepakati. Pihak pihak yang

bekerjasama wajib melakukan koordinasi. Jangka waktu kerjasama harus ditentukan contohnya kerjasama yang dilakukan dengan Perum Perhutani jangka waktu 2 tahun, Pengakhiran kerjasama juga harus tertulis dalam perjanjian, disamping itu juga keadaan memaksa (Force Majeur) yaitu keadaan yang terjadi diluar kemampuan masing masing pihak. Penyelesaian perselisihan dan Addendum yaitu hal hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan diatur lebih lanjut.

Uraian diatas merupakan isi dari surat perjanjian kerjasama yang dibutuhkan apabila stakeholder akan melakukan kerjasama dengan stakeholder yang lain. Tentu saja dalam perjanjian itu didasarkan pada prinsip kolaborasi, agar sasaran bersama tercapai dan kepentingan para stakeholder terpenuhi. Diharapkan Obyek wisata alam menjadi destinasi wisata.

BAB V

PENUTUP

Indonesia memiliki keindahan alam yang sangat menarik karena letak geografi Indonesia yang memungkinkan berkembangnya beraneka ragam flora dan fauna. Keindahan alam yang sangat menarik ini dapat dijadikan sebagai obyek wisata alam. Dalam penelitian ini mengambil obyek wisata alam Curugsewu, sebagai role model karena sesuai dengan penelitian yang dilakukan penulis, antara lain memiliki stakeholders, dengan kepentingan yang berbeda beda. Tetapi memiliki tujuan yang sama yaitu akan menjadikan Obyek Wisata Curugsewu menjadi destinasi wisata. Stakeholder Obyek Wisata Curugsewu meliputi Pemerintah Daerah, Swasta, Lembaga Pendidikan, Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH), masyarakat Desa, Perum Perhutani dan Keamanan. Pengelolaan obyek wisata alam Curug Sewu selama ini belum optimal. Hal ini diketahui dari banyaknya pengunjung yang masih didominasi wisatawan dalam negeri. Sedang pengunjung dari manca negara selama 7 tahun terakhir tidak ada. Pembenahan harus dilakukan, salah satu cara melalui model kolaborasi pengelolaan obyek wisata alam. Model Kolaborasi pengelolaan obyek wisata alam diharapkan dapat merangkul semua stakeholders agar memiliki kesepahaman dan kesepakatan dalam mengelola obyek wisata alam tersebut. Dalam implementasi model kolaborasi ada 3 hal pokok yang harus dilakukan yaitu, persiapan tahap awal menghasilkan *Memorandum Of Understanding (MOU)*, setelah MOU masing masing stakeholders dapat melakukan kolaborasi dengan membuat kesepahaman dan kesepakatan yang dituangkan dalam Surat Perjanjian Kerja (SPK). Tahap berikutnya untuk mengetahui keberhasilan kerjasama secara kolaboratif dilakukan monitoring dan evaluasi. Hasil dari monitoring dan evaluasi dijadikan materi untuk saling belajar diantara para stakeholders, yang pada akhirnya akan mencapai tujuan yang sudah ditetapkan bersama.

DAFTAR PUSTAKA

- Bedwell, Wendy L. Jessica L. Wildman, Deborah DiazGranados, Maritza Salazar, William S. Kramer, Eduardo Salas, Collaboration at work: An integrative multilevel conceptualization, *Human Resource Management Review*, journal (2012), homepage: www.elsevier.com/locate/humres (Diakses tanggal 26 Pebruari 2017)
- Cassell, C.; Symon, G.. *Qualitative Methods in Organizational Research*. London (1994) : Sage
- Yoeti, H.Oka A. *Perencanaan & Pengembangan Pariwisata*, Balai Pustaka, (2016), Jakarta Timur.
- Yuliari, Giyah, *Kajian Potensi Kecamatan Patean Kabupaten Kendal*. 2013
- Michael A. Hitt, R Duane Ireland & Robert E. Hoskisson, *Manajemen Strategik, Daya Saing & Globalisasi* buku 1 dan 2, (2001), Penerbit Salemba Empat Jakarta.
- Nugroho, Iwan, *Ekowisata Dan Pembangunan Berkelanjutan*, Pustaka Pelajar, (2015), Yogyakarta.
- Patel, Harshada , Michael Pettitt, John R. Wilson, Factors of collaborative working: A framework for a collaboration model, *Applied Ergonomics* 43 (2012) 1e26, journal homepage: www.elsevier.com/locate/apergo (Diakses 21 Juni 2017 Jam 10.20)
- Pearce, John A. & Robinson, Richard B, Jr, *Manajemen Strategik*, Jilid 1 & 2, edisi 10, (2009) Salemba Empat Jakarta.
- Pitana, I Gde, Prof. Dr. MSc, Ir. Putu G. Gayatri., MSi, *Sosiologi Pariwisata*, CV Andy Offset, 2005, Yogyakarta,
- Planche Beate, Sharratt Lyn, *LEADING COLLABORATIVE LEARNING Empowering Excellence*, Corwin, (2016), United State Of America.
- Strauss, A. L.. *Qualitative Anaysis for Social Scientists*. New York: Cambridge University Press 1987
- Suwantoro , Gamal SH, *Dasar Dasar Pariwisata*, CV Andy Offset, (2004) , Yogyakarta
- Taylor, S. J.; Bogdan, R.. *Introduction to Qualitative Reserach Methods : The Search for Meaning (2nd ed.)*. New York : John Wiley & Sons, 1984.
- Undang-Undang No. 5 Tahun 1990, Tentang : Konservasi Sumberdaya Alam Hayati Dan Ekosistemnya.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009, Tentang Kepariwisataaan.

Waligo, Victoria M., Jackie Clarke, Rebecca Hawkins, Implementing sustainable tourism: A multi-stakeholder involvement management framework, *Tourism Management* 36 (2013) 342e353. Journal homepage: www.elsevier.com/locate/tourman (Diakses Tanggal 24 Januari 2017).

Wikipedia, <https://id.wikipedia.org/wiki/Model> (Diakses 26 Juni 2017)

Winara, Aji dan Mukhtar, Abdullah Syarief, Potensi Kolaborasi Dalam Pengelolaan Taman Nasional Teluk Cenderawasih Di Papua, *Jurnal Penelitian Hutan Dan Konvservasi Alam*. Vol. 8 No. 3 : 217-226. 2011
<https://www.google.com/search?q=Potensi+Kolaborasi+Dalam+Pengelolaan+Taman+Nasional> (Diakses tanggal 25 Maret 2017 jam 23.30).

Wong, Emma P.Y. Victoria, Nina Mistilis, Larry Dwyer, A Model Of Asean Collaboration In Tourism, *Annals of Tourism Research*, Vol. 38, No. 3, pp. 882–899, 2011, www.elsevier.com/locate/atoures (Diakses tanggal 17 Juli 2017)

